

## **BAB 1V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Perkembangan Tingkat Urbanisasi di Provinsi Sumatera Selatan**

Tingkat urbanisasi di Kota dan Kabupaten selama periode 2016 sampai 2021 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kota Palembang menjadi kota dengan rata-rata tingkat urbanisasi paling tinggi diantara Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan angka rata-rata 91 persen, penyebabnya adalah Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota berstandar internasional. Tentunya, akan memberikan daya tarik tersendiri untuk para penduduk migran datang ke kota ini. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Soo (2005) yang mengatakan bahwa ukuran populasi kota-kota di negara-negara berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor administrasi dan politik, sehingga biasanya kota-kota terbesar di setiap wilayah merupakan ibukota dari setiap wilayahnya (Mardiansjah & Rahayu, 2019).

Kondisi fluktuasi pada Tingkat Urbanisasi di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan diakibatkan karena adanya berbagai motif masyarakat yang melakukan urbanisasi ke Provinsi Sumatera Selatan mulai dari kepentingan untuk berdagang, mencari kerja, menempuh pendidikan atau bahkan bermukim secara tetap. Misalnya fenomena fluktuasi yang terjadi di Kota Palembang dimana pada tahun 2018 memiliki nilai paling tinggi pada perkembangan tingkat urbanisasi periode 2016 sampai 2021 penyebabnya adalah peningkatan urbanisasi dipicu pembangunan infrastruktur yang marak di Sumsel, terutama di Palembang sebagai ibukota provinsi dan Kota Palembang menjadi kota perhelatan akbar Asian Games.

Tabel 4.1 Perkembangan Urbanisasi di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2016-2021 (persen)

No	Kota/Kab	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Ogan Komering Ulu	0,32	0,34	0,32	0,35	0,36	0,39	0.35
2	Ogan Komering Ilir	0,06	0,08	0,11	0,08	0,09	0,10	0.09
3	Muara Enim	0,24	0,30	0,28	0,24	0,25	0,31	0.27
4	Lahat	0,24	0,31	0,28	0,29	0,23	0,32	0.28
5	Musi Rawas	0,06	0,14	0,15	0,09	0,10	0,15	0.12
6	Musi Banyuasin	0,11	0,16	0,18	0,12	0,19	0,18	0.16
7	Banyuasin	0,22	0,20	0,24	0,22	0,23	0,29	0.23
8	Ogan Komering Ulu Selatan	0,10	0,18	0,17	0,15	0,18	0,21	0.17
9	Ogan Komering Ulu Timur	0,09	0,09	0,11	0,15	0,18	0,19	0.14
10	Ogan Ilir	0,18	0,21	0,17	0,19	0,23	0,22	0.20
11	Empat Lawang	0,08	0,07	0,15	0,09	0,18	0,16	0.12
12	Pali	0,21	0,18	0,15	0,19	0,18	0,17	0.18
13	Musi Rawas Utara	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0.11
14	Palembang	0,90	0,89	0,93	0,92	0,92	0,91	0.91
15	Prabumulih	0,69	0,66	0,71	0,68	0,69	0,70	0.69
16	Pagar Alam	0,58	0,59	0,61	0,59	0,58	0,57	0.59
17	Lubuk Linggau	0,76	0,73	0,72	0,78	0,74	0,75	0.75

Sumber : BPS, data diolah (2022).

#### 4.1.2 Perkembangan Upah Minimum Kota di Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan

Upah minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2016-2021 cenderung mengalami tren yang positif. Namun, berdasarkan pada PP nomor 78 tahun 2015 pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan bahwa upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, ini berarti bahwa upah minimum yang meningkat tersebut diimbangi dengan biaya hidup yang meningkat pula.

Jika kita melihat tabel 4.2 dibawah pada tahun 2021, kenaikan upah minimum Kota tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Misalnya Kota Palembang yang rata-rata peningkatan Upah Minimum Kota selama 2016-2020 adalah sebesar 0,9 persen, sedangkan pada tahun 2021 Upah Minimum Kotanya hanya meningkat sebesar 0,3 persen. Ini dapat disebabkan karena dampak Covid-19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian di Indonesia. Adapula kota dan kabupaten lainnya pada tahun 2021 untuk peningkatan Upah Minimumnya stabil dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.2 Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

No	Kota/Kab	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Ogan Komering Ulu	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
2	Ogan Komering Ilir	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
3	Muara Enim	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
4	Lahat	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
5	Musi Rawas	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
6	Musi Banyuasin	2.2	2.4	2.63	2.9	3.14	3.25	2.75
7	Banyuasin	2.24	2.42	2.63	2.84	3.09	3.19	2.74
8	Ogan Komering Ulu Selatan	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
9	Ogan Komering Ulu Timur	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
10	Ogan Ilir	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
11	Empat Lawang	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
12	Pali	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
13	Musi Rawas Utara	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
14	Palembang	2.29	2.48	2.73	2.93	3.16	3.27	2.81
15	Prabumulih	2.2	2.38	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
16	Pagar Alam	2.2	2.39	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73
17	Lubuk Linggau	2.2	2.40	2.59	2.91	3.04	3.25	2.73

Sumber : BPS, data diolah (2022).

Kota Palembang ditetapkan sebagai Kota dengan nominal Upah minimum kota tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan, Hal tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah serta berdasarkan pada faktor-faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan upah minimum (Atiyatna et al., 2016). Berdasarkan tabel 4.2 diatas juga ada beberapa daerah memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda. Ketentuan kenaikan rata-rata Upah Minimum Kota tersebut ditetapkan bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

#### 4.1.3 Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan

Tabel 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (persen)

No	Kota/Kab	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Ogan Komerling Ulu	3.96	4.06	4.88	5.66	-0.01	2.51	3.51
2	Ogan Komerling Ilir	4.47	5.11	4.94	5.08	0.24	3.37	3.87
3	Muara Enim	6.78	7.16	8.65	7.02	0.03	5.75	5.90
4	Lahat	2.34	4.44	4.07	5.62	0.36	4.63	3.58
5	Musi Rawas	5.25	5.03	5.79	5.87	0.23	2.33	4.08
6	Musi Banyuasin	2.17	3.02	3.21	4.57	-0.04	3.42	2.73
7	Banyuasin	5.89	5.05	5.10	5.22	0.13	3.84	4.21
8	Ogan Komerling Ulu Selatan	5.19	4.51	5.05	5.08	0.37	4.38	4.10
9	Ogan Komerling Ulu Timur	6.17	3.37	4.29	5.80	0.37	4.66	4.11
10	Ogan Ilir	5.13	5.14	5.18	5.19	0.14	3.77	4.09
11	Empat Lawang	4.54	3.71	4.23	3.62	0.09	3.82	3.34
12	Pali	5.19	5.97	6.38	6.16	0.28	2.18	4.36
13	Musi Rawas Utara	2.70	4.65	4.21	4.15	0.37	2.39	3.08
14	Palembang	5.74	6.21	6.48	5.86	-0.27	3.17	4.53
15	Prabumulih	6.62	5.27	5.83	5.61	-0.18	3.05	4.37
16	Pagar Alam	4.41	4.81	4.18	3.51	0.02	4.39	3.55
17	Lubuk Linggau	6.33	6.31	5.93	5.68	-0.13	3.15	4.55

Sumber : BPS (2022).

Secara umum data menunjukkan bahwa laju pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan bersifat fluktuatif. Muara Enim tercatat sebagai kabupaten yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi diantara Kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,89 persen selama periode 2016 sampai 2021 serta pertumbuhannya cenderung meningkat per tiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis, Muara Enim juga tercatat sebagai Kabupaten dengan nilai tertinggi yang diraih pada tahun 2018 dengan nilai 8,65 persen, penyebabnya yaitu adalah muaraenim ditopang oleh struktur ekonomi yang sebagian besar terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian serta usaha pertanian. Kota Palembang menjadi kota kedua dengan nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi diantara Kota dan Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,44 persen selama periode 2016 sampai 2021.

Kota Palembang yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Sumatera Selatan mengalami kontraksi terdalam yaitu -0,25 persen, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai kontributor terbesar kedua juga mengalami kontraksi dengan kedalaman 0,04 persen, kabupaten/kota lainnya yang mengalami kontraksi adalah Kota Prabumulih dengan kedalaman 0,18 persen, Kota Lubuk Linggau mengalami kontraksi 0,13 persen, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengalami kontraksi 0,01 persen. Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan masih mampu tumbuh positif pada kisaran 0,01 – 0,41 persen. Penyebabnya adalah Pandemi Covid-19 yang membatasi seluruh aktivitas perekonomian yang berlangsung sepanjang tahun 2020 mengakibatkan seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kontraksi yang cukup dalam.

#### 4.1.4 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum keadaan tingkat kesempatan kerja di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan bisa diinterpretasikan dengan angka yang relatif tinggi karena nilai yang tertera di data dari periode 2016-2019 hampir memiliki nilai 100 persen, namun menurun begitu drastis pada periode tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Analisis secara keseluruhan dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa kondisi tingkat kesempatan kerja di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan cenderung bersifat fluktuaktif per tahunnya.

Tabel 4.4 Perkembangan Kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan tahun  
2016-2021 (persen)

No	Kota/Kab	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Ogan Komering Ulu	91,61	95,5	95,38	95,45	70,49	69,95	86.40
2	Ogan Komering Ilir	92,28	96,55	97,39	97,09	68,8	69,67	86.96
3	Muara Enim	93,68	96,69	95,73	95,21	52,12	69,56	83.83
4	Lahat	95,58	95,67	96,71	96,36	46,78	69,53	83.44
5	Musi Rawas	97,66	97,19	96,77	97,09	70,95	70,52	88.36
6	Musi Banyuasin	92,62	97,25	96,7	95,85	77,85	69,18	88.24
7	Banyuasin	91.09	96,35	96,15	96,09	85,23	65,54	88.41
8	Ogan Komering Ulu Selatan	93,45	96,46	95,89	97	44,82	76,18	83.97
9	Ogan Komering Ulu Timur	97,7	97,64	96,49	96,58	73,66	71,3	88.90
10	Ogan Ilir	96,18	96,8	97,57	96,74	43,69	68,47	83.24
11	Empat Lawang	94,12	96,15	97,72	97,35	43,81	72,29	83.57
12	Pali	98,8	95,57	96,21	95,94	55,78	73,13	85.91
13	Musi Rawas Utara	96,48	93,88	95,77	96,34	75,06	69,68	87.87
14	Palembang	91,36	91,8	92,78	92,06	40,52	63,93	78.74
15	Prabumulih	95,87	93,27	93,01	93,95	75,14	69,41	86.78
16	Pagar Alam	97,04	97,42	96,97	97,54	50	74,19	85.53
17	Lubuk Linggau	93,76	95,99	92,49	95,33	69,98	73,6	86.86

Sumber : SAKERNAS Sumatra Selatan 2021, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.4 Kota Palembang menjadi kota dengan tingkat kesempatan kerja yang paling rendah diantara Kota dan Kabupaten lainnya penyebabnya adalah disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran di Kota Palembang serta tingginya tingkat migrasi penduduk yang masuk ke Kota Palembang (Nahara et al., 2022). Penyebab lainnya adalah urbanisasi, Urbanisasi seringkali dapat terlihat dari bertambahnya kepadatan penduduk yang ada di wilayah perkotaan. Untuk melihat tingkat urbanisasi di suatu wilayah, umumnya dengan membandingkan jumlah penduduk yang berada di wilayah perkotaan sebelumnya dengan jumlah penduduk yang ada setelahnya selama dalam kurung waktu yang di tentukan (Rijal & Tahir, 2022).

Keadaan fluktuasi dalam tingkat kesempatan kerja di kota Palembang, ini menandakan bahwa permintaan tenaga kerja di kota Palembang belum terlalu diperhatikan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk.

#### **4.1.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan**

Rata-rata lama sekolah pada Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata total tahun yang ditempuh oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk tersebut.

Rata-rata lama sekolah di Kota dan Kabupaten bisa dilihat pada tabel 4.5 Selama tahun 2016-2021, rata-rata lama sekolah di Kota dan Kabupaten Provinsi

Sumatera Selatan berada di kisaran 6 hingga 10 tahun. Kota Palembang merupakan kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di antara 17 Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2016-2021 jika di rata-ratakan hanya selama 10 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Palembang selama tahun 2016 hingga 2021 hanya menempuh pendidikan formal selama 10 tahun atau setara dengan kelas 10 SMA. Pali secara berurutan selama periode tahun 2016-2021 menjadi kabupaten dengan nilai rata-rata lama sekolah terendah yaitu 6,7 tahun atau bisa diasumsikan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pali hanya setara kelas 6 SD. Jika dibandingkan dengan wajib belajar Indonesia dengan minimal wajib belajar adalah selama 12 tahun, ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah di tujuh belas Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tergolong masih rendah. Rata-rata lama sekolah di tujuh belas Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya di bawah batas minimal yaitu 12 tahun atau setara dengan SMA.

Tabel 4.5 Perkembangan Rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (tahun)

No	Kota/Kab	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Ogan Komering Ulu	8.81	9.08	8.82	8,9	8,8	9,09	8.90
2	Ogan Komering Ilir	7.25	7.45	7.41	7,25	7,46	7,19	7.37
3	Muara Enim	8.02	7.93	8.20	8,32	8,21	8,28	8.05
4	Lahat	8.40	8.93	8.70	8,77	8,8	8,93	8.68
5	Musi Rawas	7.41	7.79	7.77	8,03	7,89	7,8	7.66
6	Musi Banyuasin	7.55	8.05	7.68	7,87	7,96	8,05	7.76
7	Banyuasin	7.12	7.62	7.59	7,78	7,68	8,27	7.44
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.60	8.02	8.10	7,94	8,17	8,16	7.91
9	Ogan Komering Ulu Timur	7.63	7.66	7.90	8,08	7,99	7,94	7.73
10	Ogan Ilir	7.79	7.84	8.17	8,39	8,37	8,17	7.93



11	Empat Lawang	7.64	7.82	7.52	7,79	8,16	8,03	7.66
12	Pali	6.70	7.08	7.04	7,28	7,63	7,11	6.94
13	Musi Rawas Utara	7.07	7.02	6.95	7,18	7,97	8	7.26
14	Palembang	10.60	9.93	10.29	10,5	10,7	11	10.46
15	Prabumulih	9.40	9.52	9.89	9,75	10,1	9,98	9.60
16	Pagar Alam	8.77	9.54	9.44	9,43	9,71	9,62	9.25
17	Lubuk Linggau	9.35	9.75	9.70	9,97	10,1	9,62	9.60

Sumber : BPS, 2022

Walaupun tergolong rendah, tren rata-rata lama sekolah di tujuh belas Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan cenderung positif. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk tiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tren positif ini berbanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan. Secara nominal, anggaran pendidikan selama 2016 hingga 2019 terus meningkat. Dari Rp370,8 triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp460,3 triliun.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pemilihan Kesesuaian Model

#### 1. Uji Chow

Berdasarkan Hasil Uji Chow Pada Tabel 4.6, nilai probabilitas pada *Cross-section Chi Square*  $0,0000 < 0,05$ . Artinya, model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	74.111665	(16,81)	0.0000
Cross-section Chi Square	55.009455	16	0.0000

Sumber: Hasil Uji Chow Menggunakan Eviews 9

## 2. Uji Hausman

Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f	Prob.
Cross-section random	96.624129	4	0.0000

Sumber: Hasil Uji Hausman Menggunakan Eviews 9

Hasil Uji Hausman pada Tabel 4.7 menunjukkan probabilitas *Cross-section random* adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya model terbaik dalam uji Hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

## 3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 4.8 Hasil Uji LM

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	22.87611 (0.0000)	3.002526 (0.0831)	25.87863 (0.0000)

Sumber: Hasil Uji LM menggunakan Eviews 9.

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) menunjukkan nilai probabilitas pada Breusch- Pagan adalah sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Model terbaik yang dapat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman memilih Fixed Effect Model (FEM), sedangkan Uji LM memilih *Random Effect Model* (REM), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variable independen atau bebas. Apabila di atas 0.90 dapat menjadi pertanda bahwa terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

	UMK	PDRB	TKK	PEND
UMK	1.000000	-0.482396	-0.692624	0.183226
PDRB	-0.482396	1.000000	0.729828	-0.026333
TKK	-0.692624	0.729828	1.000000	-0.203609
PEND	0.183226	-0.026333	-0.203609	1.000000

Sumber: Eviews 10, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui jika nilai korelasi antara Upah Minimum Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0.482396. Nilai korelasi antara Upah Minimum Kota dan Tingkat Kesempatab Kerja sebesar -0.692624. Nilai korelasi antara Upah Minimum Kota dan Pendidikan sebesar 0.183226. Nilai korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 0.729828. Nilai korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan sebesar -0.026333 serta Nilai korelasi antara Tingkat Kesempatan Kerja dan Pendidikan adalah sebesar -0.203609 . Dapat di simpulkam bahwa semua data kurang dari 0.90 ( $< 0.90$ ), Maka semua data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

#### 4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, apabila output mempunyai nilai probabilitas Chi-square yang signifikan (nilai  $p=0.0000$ ). maka terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika nilai  $p > 0.0000$  maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Prob.
UMK	0.041555	0.1145
PEND	-1.99E-09	0.6934
TKK	-0.001589	0.2593
PDRB	-6.55E-05	0.6740

Sumber: Eviews 9, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji heterokedastisitas dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Hal tersebut dikarenakan nilai probability dari setiap variable independen lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ .

#### 4.4 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan Tabel 4.11 yang menunjukkan hasil regresi menggunakan model *Fixed Effect*, maka model dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$UB = C 0.245501 + UMK 0.019660 + PDRB 0.021726 + TKK 0.053250 + RLS 0.065719$$

Nilai konstanta pada Tabel 4.11 menunjukkan nilai sebesar 0.245501. Artinya, jika variabel Upah minimum (UM), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) bernilai nol, maka variabel Tingkat Urbanisasi adalah bernilai 0.245501 persen.

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Fixed Effect Model Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.245501	0.109674	2.238461	0.0279

UMK	0.019660	1.09E-08	1.811907	0.0737
PDRB	0.021726	0.016358	2.482013	0.0610
TKK	0.053250	0.002124	2.506874	0.0142
PEND	0.065719	0.013428	0.489424	0.6259
	R-squared		0.991818	
	F-statistic		490.9308	
	Prob (F-statistic)		0.00000	

Sumber: Hasil menggunakan Eviews 9.

Variabel UMK dengan koefisien sebesar 0.019660 yang berarti jika UMK meningkat sebesar satu persen maka Tingkat Urbanisasi akan meningkat sebesar 1.965984 persen. Selanjutnya nilai koefisien variabel PDRB sebesar 0.021726 yang berarti jika PDRB meningkat sebesar satu persen maka Urbanisasi akan meningkat sebesar 0.021726 persen. Kemudian untuk nilai koefisien variabel TKK yaitu positif sebesar 0.053250 dari nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Urbanisasi meningkat satu persen maka TKK akan meningkat sebesar 0.053250 persen. Variabel RLS merupakan variabel terakhir dalam penelitian ini dan memiliki nilai koefisien sebesar 0.065719 hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan RLS sebesar satu persen maka Urbanisasi akan meningkat sebesar 0.065719 persen.

Tujuh belas Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai intersep yang bervariasi. Nilai intersep menunjukkan nilai variabel dependen di masing-masing kota dan kabupaten jika variabel independen bersifat konstan

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas dan Empat Lawang memiliki nilai intersep terkecil dan mayoritas kabupaten memiliki nilai intersep negatif. Sedangkan Kota Palembang dan seluruh wilayah di Sumatera Selatan yang berbentuk Kota yaitu Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagar Alam memiliki nilai intersep positif. Kabupaten Pali menjadi menjadi Kabupaten dengan nilai internsep paling tinggi diantara Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera

Selatan karena pada tahun 2016 Kabupaten Pali memiliki nilai tingkat kesempatan kerja paling tinggi di Provinsi Sumatera Selatan dengan tingginya Kesempatan Kerja hal itu dapat mendorong masyarakat untuk melakukan Urbanisasi ke Kabupaten Pali.

Tabel 4.12 Hasil Intersep Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

Kota Kabupaten	Intersep.	Konstanta FEM	Total	No
Palembang	0.508897	0.245501	0.754398	1
Lubuk Linggau	0.360957	0.245501	0.606458	2
Prabumulih	0.303314	0.245501	0.548815	3
Pali	0.303314	0.245501	0.548815	4
Ogan Komering Ulu	0.303314	0.245501	0.548815	5
Pagar Alam	0.210091	0.245501	0.455592	6
Lahat	-0.09156	0.245501	0.153944	7
Muara Enim	-0.10628	0.245501	0.139222	8
Banyuasin	-0.11788	0.245501	0.127619	9
Ogan Ilir	-0.16508	0.245501	0.080422	10
Ogan Komering Ulu	-0.18964	0.245501	0.055857	11
Musi Banyuasin	-0.19339	0.245501	0.052107	12
Ogan Komering Ulu Timur	-0.22241	0.245501	0.023093	13
Ogan Komering Ilir	-0.22244	0.245501	0.023066	14
Musi Rawas Utara	-0.22244	0.245501	0.023066	15
Musi Rawas	-0.22392	0.245501	0.02158	16
Empat Lawang	-0.23485	0.245501	0.010652	17

Sumber: Hasil Intersep menggunakan Eviews .

Kota Palembang memiliki nilai intersep tertinggi sebesar 0,508897, jika ditambahkan dengan konstanta pada *Fixerd Effect Model* maka nilai konstanta pada Kota Palembang adalah 0.754398 yang artinya jika variabel independen yaitu variabel UMK, PDRB, TKK dan RLS pada Kota Palembang nol, maka Urbanisasi pada Kota Palembang adalah sebesar 0.754398 persen. Tingkat urbanisasi paling

tinggi di Kota Palembang disebabkan karena Upah Minimum di Kota Palembang merupakan Kota dengan Upah Minimum tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga menjadi penyebab masyarakat urban di luar Kota Palembang untuk melakukan urbanisasi ke Kota Palembang.

Kota dan Kabupaten dengan nilai intersep terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang bernilai -0.23485 yang bila dijumlahkan dengan konstanta akan mendapatkan nilai sebesar 0.010652. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel UMK, PDRB, TTK dan RLS pada Kabupaten Empat Lawang adalah nol maka Urbanisasi di Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar 0.010652.

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai intersep, maka Tingkat Urbanisasi juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah nilai intersep atau nilai intersep bernilai negatif, maka Tingkat Urbanisasi juga akan semakin rendah.

#### **4.4.1 Hasil Uji Statistik-t**

Tabel 4.9 menunjukkan hasil perhitungan dari uji statistik-t. Hasil uji statistik-t dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Probabilitas statistik-t pada variable Upah Minimum Kota (UMK) sebesar  $0.0737 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima. Dengan nilai koefisien sebesar 0.019660 yang berarti bahwa variabel UMK memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB).
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar 0.021726 dengan probabilitas statistik-t bernilai  $0.0610 > 0,05$  yang

menandakan bahwa  $H_0$  diterima. Nilai koefisien variabel PDRB dan probabilitas statistik-t menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi.

3. Probabilitas statistik-t pada variable Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar  $0.0142 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima. Dengan nilai koefisien sebesar 0.053250 yang berarti bahwa variabel TKK memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB).
4. Probabilitas statistik-t Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bernilai  $0.6259 > 0,05$  maka disimpulkan  $H_0$  diterima. Nilai koefisien RLS adalah sebesar 0.065719. Dapat disimpulkan bahwa variabel RLS memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap variable Tingkat Urbanisasi.

#### **4.4.2 Hasil Uji F**

Hasil uji F yang ditunjukkan pada Tabel 4.8. Terlihat bahwa probabilitas F-statistik adalah sebesar  $0.000000 < 0,05$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Upah Minimum Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Kesempatan Kerja dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB).

#### **4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan uji  $R^2$  yang ditunjukkan pada Tabel 4.9, nilai R-squared adalah sebesar 0.991818. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independent yang terdiri dari Upah Minimum Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Tingkat Kesempatan Kerja dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mampu menjelaskan



variabel Tingkat Urbanisasi (URB) sebesar 99,1 persen. Sisanya yaitu sebesar 0,99 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Tingkat Upah Minimum Terhadap Tingkat Urbanisasi**

Berdasarkan hasil estimasi pada *Fixed Effect Model* yang terdapat pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel UMK adalah sebesar  $0,6791 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Kota (UMK) memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Urbanisasi (URB).

Nilai koefisien variabel Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 0.019660 menginterpretasikan bahwa variabel UMK memiliki hubungan yang positif terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB). Jika variabel UMK meningkat sebesar satu persen maka URB juga akan meningkat sebesar 0.019660 persen. Sebaliknya jika UMK menurun sebesar satu persen maka URB juga akan turun sebesar 0.019660 persen. Hal ini juga sesuai dengan teori Todaro (2004) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa dan kota mendorong penduduk desa untuk datang ke kota.

Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Suffina & Suharto (2022) yang meneliti bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Urbanisasi di Provinsi Samarinda hasilnya adalah Upah Minimum Kota berpengaruh signifikan terhadap Urbanisasi. penelitian serupa juga dilakukan oleh Luciana Sari (2018) yang menemukan bahwa Upah Minimum Kota berpengaruh signifikan terhadap

Urbanisasi. Santoso et al., (2018) Secara umum meneliti dampak peningkatan upah minimum terhadap migrasi internal di Sulawesi Selatan sejalan anggapan Harris-Todaro (1970) dan temuan Boffy- Ramirez (2013) bahwa kenaikan upah minimum yang tinggi akan meningkatkan pendapatan yang diharapkan calon migran dan menarik lebih banyak migran. Valentino (2018) meneliti juga bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Urbanisasi, hasilnya tingkat upah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat urbanisasi.

#### **4.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Urbanisasi**

Hasil Estimasi pada Tabel 4.9 menunjukkan Variabel PDRB memiliki koefisien bernilai 0.021726 dan probabilitas variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar  $0,0610 > 0,05$  yang menandakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB). Artinya, Setiap kenaikan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu persen, maka akan meningkatkan Tingkat Urbanisasi sebesar 0.021726 persen.

Hasil penelitian sesuai dengan teori teori Todaro (2006) yang mengatakan bahwa kaitan positif antara urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu semakin maju suatu Negara yang di ukur dengan pendapatan perkapita, maka semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara pendapatan per kapita terhadap tingkat urbanisasi.

Penelitian ini di ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Urbanisasi di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Todaro semakin maju suatu Negara yang di ukur dengan pendapatan perkapita, maka semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal di

daerah perkotaan, Berdasarkan hasil estimasi di atas, disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto, maka akan semakin meningkat pula tingkat urbanisasi di Provinsi Sumatera Selatan. Dikarenakan dengan adanya keadaan perekonomian yang membaik dilihat dari stabilnya atau meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto tiap tahunnya dalam daerah tersebut maka masyarakat yang di desa akan melakukan urbanisasi ke daerah yang dianggap layak dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan kesejahteraan taraf hidup, menurut Monanisa & Armansyah (2019) keadaan Urbanisasi di Provinsi Sumatera Selatan di dominiasi oleh penduduk Urban dengan motif untuk mencari tenaga kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arouri et al., (2014) yang meneliti bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Urbanisasi di negara Afrika hasilnya adalah Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Urbanisasi penyebabnya adalah urbanisasi yang terjadi di Afrika di dorong oleh kondisi geografis dan perubahan iklim, khususnya, yang telah membuat pedesaan tidak dapat bertahan sehingga mengharuskan penduduk desa melakukan Urbanisasi ke Kota.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luciana Sari (2018), Suffina & Suharto (2022), dan Wulandari (2017) yang juga mengungkapkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Urbanisasi yang berarti Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan Tingkat Urbanisasi. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Tingkat Urbanisasi juga akan semakin tinggi.

### 4.5.3 Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Urbanisasi

Hasil penelitian dengan menggunakan model regresi data panel ditemukan bahwa variabel tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat urbanisasi diperoleh nilai signifikan sebesar  $0.0142 > 0,05$  dan koefisien regresinya sebesar  $0.053250$  yang artinya setiap peningkatan tingkat kesempatan kerja sebesar 1 persen maka akan meningkatkan tingkat urbanisasi sebesar  $0.053250$  persen.

Hasil penilitan ini juga sejalan dengan teori *Human Capital Model*. Dalam model ini, niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini, Todaro (2006) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi (perpindahan) merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik di daerah tujuan. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah merupakan peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Teori neoklasik beranggapan bahwa jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama dengan permintaan. Keadaan pada saat penyediaan tenaga sama dengan permintaan dinamakan titik ekuilibrium (titik E). Dalam hal penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan, tidak terjadi pengangguran. Hal ini didasarkan pada ide dasar *Human Capital Model*. Dalam model ini niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik.

Menurut Hasnah (2019) Riardy (2013), Yan Friata (2010) dan Irawan (2015) penelitian mereka menunjukkan adanya pengaruh hubungan yang positif dan

signifikan antara Tingkat Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Urbanisasi. Penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini dimana adanya pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Urbanisasi di Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan.

#### **4.5.4 Pengaruh Pendidikan Terhadap Urbanisasi**

Nilai Probabilitas dari variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai representasi dari pendidikan ditunjukkan pada Tabel 4.9 adalah sebesar  $0,6259 > 0,05$ . Angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi (URB). Koefisien yang bernilai sebesar 0.065719 menandakan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Urbanisasi. Jika Rata-rata Lama Sekolah meningkat sebesar satu persen, maka Tingkat Urbanisasi akan meningkat juga sebesar 0.06571.

Secara teori penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2006) bahwa adanya korelasi positif antara pendidikan dengan migrasi. Seseorang yang melakukan migrasi dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dan upah yang di dapat lebih tinggi di sektor modern atau sektor di perkotaan. Penelitian Wulandari (2017) dan Fauziyah (2016) sesuai dengan penelitian ini karena dalam penelitiannya ada hubungan yang positif antara Pendidikan terhadap Tingkat Urbanisasi namun tidak signifikan. Berdasarkan fenomena yang terjadi urbanisasi di Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan hasil estimasi tidak sesuai dengan fakta dimana rata-rata lama sekolah menjadi indikator yang dapat menggambarkan tingkat pendidikan tidak

dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan urbanisasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa tidak ada kaitan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan terhadap keinginan untuk melakukan urbanisasi demi memperoleh kehidupan yang lebih baik di perkotaan sesuai pendidikan yang dimilikinya, keadaan tempat tinggal masyarakat Sumatera Selatan yang sebagian besar berada di pedesaan dan jauh dari pusat pendidikan menyebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasnah (2019) di dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia dan penelitian yang dilakukan oleh Faradhila (2022) di dalam penelitiannya Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Urbanisasi.